



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat

1. Gubernur,
2. Bupati/Walikota,
di Seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR : 03.E/30/DJB/2012

TENTANG

PUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga maka telah menimbulkan beban biaya ekonomi tinggi karena adanya pungutan sumbangan pihak ketiga yang wajib dibayar oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk setiap penjualan komoditas tambangnya.

Peraturan Daerah tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 128 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dan menindaklanjuti *Action Plan* Atas Hasil Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diminta agar Saudara gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk tidak memungut sumbangan pihak ketiga kepada pemegang IUP, KK, dan PKP2B di daerah Saudara.

Demikian Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2012



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

HAMRIN SIHITE 7

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Keuangan
5. Pimpinan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Dinas ESDM Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia